

DAMPAK PASCA REKLAMASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

Andi Ainun Juniarsi Nur¹, Nunung Nurwati²

¹. Pascasarjana Sosiologi, Universitas Padjadjaran
andiainun012@gmail.com

ABSTRAK

Reklamasi merupakan suatu bentuk intervensi manusia pada lingkungan pesisir untuk kepentingan ekonomi. Namun, seringkali kebijakan reklamasi dijalankan tanpa memperhatikan dampak sosial-ekonomi pada masyarakat lokal. Tulisan ini membahas reklamasi yang memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder berupa data yang dikeluarkan lembaga terkait dan menjadikan rujukan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reklamasi sering kali dijalankan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan asing, sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial. Dalam konteks ekologi politik, reklamasi berdampak pada hilangnya sumber daya alam yang berujung pada ketidakadilan lingkungan dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya alam. Hal ini menambah kesengsaraan nelayan pesisir yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari ikan dengan jarak yang lebih jauh. Selain itu, kurang pemasukan berdampak pada pendidikan anak nelayan yang harus terputus dikarenakan biaya. Reklamasi ini juga sangat berdampak pada kondisi lingkungan laut. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yaitu rendahnya keanekaragaman spesies biota dan meningkatnya kandungan polutan seperti logam berat dan bahan organik, melebihi perkembangan maksimal organisme tropis.

Kata kunci: Reklamasi, Kemiskinan, Ekologi Politik

ABSTRACT

Reclamation is a form of human intervention in the coastal environment for economic gain. However, reclamation policies are often implemented without regard to the socio-economic impacts on local communities. This paper discusses the impact of reclamation on environmental damage and poverty in Makassar City. This research is conducted by collecting data through literature study by collecting secondary data in the form of data issued by related institutions and making reference to relevant previous research. The results show that reclamation policies are often run by governments influenced by business and foreign interests, potentially increasing social inequality. In the context of political ecology, reclamation has an impact on the loss of natural resources which leads to environmental injustice and unequal access to natural resources. This adds to the woes of coastal fishermen who have to incur additional costs to fish over longer distances. In addition, the lack of income has an impact on the education of fishermen's children who must be interrupted due to costs. This reclamation also greatly impacts the condition of the marine environment. This is based on several indicators, namely the low diversity of biota species and the increased content of pollutants such as heavy metals and organic matter, exceeding the maximum development of tropical organisms.

Keywords: Reclamation, Poverty, Political Ecology

¹ Pascasarjana Sosiologi, Universitas Padjadjaran
andiainun012@gmail.com

² Pascasarjana Sosiologi, Universitas Padjadjaran
nngnurwati@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Penduduk Kota Makassar terdiri dari sebagian suku yang hidup damai berdampingan. Penduduk Makassar mayoritas dari suku Makassar, selebihnya suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dll. Sebagian besar penduduknya merupakan sebaran Teritorial Muslim, Kota Makassar dibagi jadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW serta 4446 RT. Kota Makassar mempunyai luas daerah 128, 18 km² (total 175, 77 km²) dengan jumlah penduduk 1. 432. 189 jiwa serta kepadatan penduduk sebesar 8. 148/ km² (BPS Kota Makassar, 2023).

Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia secara demografis dan pembangunannya, dengan mayoritas penduduknya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa (M Iqbal YN, 2021). Sebagai kota yang berkembang pesat, Makassar mengalami permasalahan lingkungan seperti polusi udara, air, dan kepadatan penduduk. Salah satu kebijakan lingkungan di Kota Makassar yang sedang menjadi perhatian adalah kebijakan reklamasi CPI (*Center Point of Indonesia*). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kawasan ekonomi baru di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan banyak kontroversi, karena terdapat dampak negatif yang signifikan pada lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Pengembangan *Center Point Indonesia* (CPI) seluas 600 hektar meliputi pusat bisnis serta administrasi, resor, hotel kelas dunia, serta lapangan *golf* yang menghadap ke laut lepas serta pulau-pulau di Teluk Makassar (Muhammad Alfian et al., 2021). Ternyata, proses reklamasi lahan tidak berjalan dengan baik, dan dikhawatirkan dampak negatifnya yang akan ditimbulkan, seperti semakin banyak material yang hanyut, menyebabkan pendangkalan perairan, dan jika terus berlanjut akan mengancam ekosistem pesisir. Risiko ini sejalan dengan kesimpulan penelitian sebelumnya bahwa reklamasi kawasan Pantai Losari akan menimbulkan dampak pencemaran akibat sampah berserakan yang tidak lain dilakukan oleh wisatawan dan pengusaha, serta limbah dari hotel, perumahan yang berdampak pada pemulihan CPI (Fuadi et al., n.d.). Dengan memahami dampak lingkungan yang terjadi pasca reklamasi, kajian ini akan mengambil lintasan dampak sosial yang terjadi akibat pembangunan CPI.

Dalam perkembangannya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tersebut harus berusaha keras bagaimana cara melanjutkan perekonomian ditengah pembangunan CPI ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak adanya proyek ini masyarakat harus ke tengah laut yang lebih jauh dari biasanya dikarenakan tempat mereka biasa menangkap ikan terkena dampak dari reklamasi ini dan menyebabkan pengeluaran yang lebih atau berbeda di setiap harinya untuk ongkos kapal mereka. Akibatnya perekonomian keluarga menjadi menurun dan dapat berimbas pada kebutuhan yang lain seperti kebutuhan anak bersekolah dan juga kebutuhan keluarga seperti sandang dan

pangan.

Demikian, seperti yang dilaporkan pada media-media berita bahwa adanya penolakan terhadap pembangunan CPI yang dirasakan merugikan masyarakat utamanya para nelayan. Mereka merasakan hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan kerang sudah sangat sulit didapatkan. Kalau pun ada jauh berada diluar daerah tangkapan ikan sebelumnya, sebab lokasi tangkapan mereka sudah tercemar dan keruh sehingga biota laut tidak mampu bertahan lama lalu mati (Thamrin, 2022).

Pada penelitian sebelumnya berfokus terhadap kebijakan reklamasi CPI dimana penelitian sebelumnya ini lebih mengarah pada kebijakan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap proyek reklamasi CPI. Dalam salah satu pembahasannya mengenai kebijakan pembangunan CPI penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggagas ide pembangunan kawasan reklamasi CPI pada daerah sebelah barat Kota Makassar. Dari gagasan inilah lahir sebuah kebijakan pemerintah tentang pembangunan reklamasi pantai CPI yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga yang berlokasi di tanah tumbuh depan Pantai Losari Kota Makassar seluas 157.23 hektar. Namun belum ada yang melakukan penelitian yang menjelaskan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang diakibatkan adanya reklamasi ini. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi dan kerusakan lingkungan pasca terjadinya reklamasi reklamasi CPI di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur di mana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber literatur atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Sumber-sumber literatur yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai topik penelitian, mengidentifikasi gap pengetahuan atau isu-isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut, serta untuk memperoleh informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara studi dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi peneliti dalam memahami dampak sosial-ekonomi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya proyek reklamasi CPI di Kota Makassar.

Peneliti melakukan riset kepustakaan terkait sistem politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dengan mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, makalah, dan lain-lain. Setelah itu, literatur yang dikumpulkan dianalisis oleh peneliti, termasuk mengidentifikasi tema dan pola, membandingkan serta mengevaluasi hasil penelitian, serta mengembangkan gagasan baru.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Teori Ekologi Politik (Murray Bookchin)

Murray Bookchin adalah seorang tokoh ekologi politik yang terkenal dengan konsepnya tentang ekologi sosial. Dia menganggap bahwa permasalahan lingkungan merupakan akibat dari sistem politik yang tidak berkelanjutan. Menurut Bookchin, kapitalisme dan negara modern menyebabkan krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini. Dalam pandangan Bookchin, sistem politik yang berpusat pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan mengabaikan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dia menekankan bahwa solusi untuk krisis lingkungan tidak hanya melalui tindakan individu, tetapi juga membutuhkan perubahan struktural dalam sistem politik dan ekonomi (Bookchin, 1982).

Bookchin juga mengembangkan konsep "demokrasi ekologi" yang merupakan sebuah sistem politik yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Konsep ini mengutamakan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan manusia di atas kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Secara keseluruhan, konsep-konsep yang dikembangkan oleh Murray Bookchin dalam teori ekologi politiknya dapat memberikan pandangan yang kritis dan alternatif dalam memahami permasalahan lingkungan dan bagaimana sistem politik dapat berperan dalam solusi dari krisis lingkungan yang sedang terjadi (Bookchin, 1982).

Beberapa konsep kunci dalam teori ekologi politik antara lain:

1. Eksploitasi Alam

Konsep ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan atau tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem. Eksploitasi alam dapat terjadi karena kepentingan ekonomi dan politik yang tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

2. Keadilan lingkungan

Konsep ini menyoroti pentingnya kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Keadilan lingkungan menekankan perlunya mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam.

3. Ekofeminisme

Konsep ini menggabungkan perspektif ekologi dan feminisme, dengan menyoroti hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap alam. Ekofeminisme menekankan pentingnya memahami dan mengatasi kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam interaksi manusia dengan lingkungan hidup.

4. Kritisisme Ekologi Politik

Konsep ini menekankan pentingnya mengkritisi kebijakan dan praktik ekonomi dan politik yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kritisisme ekologi politik menekankan perlunya pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan lingkungan dan kepentingan jangka panjang.

Dalam analisis teori ekologi politik, dapat dikaji bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan hidup, serta dampak dari kebijakan dan praktik manusia terhadap alam. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia di Bumi.

PEMBAHASAN

Dampak Pasca Reklamasi CPI Terhadap Kondisi Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Reklamasi atau penimbunan laut terjadi dipesisir Makassar mulai gencar dilakukan sejak tahun 2003 hingga tahun 2010. Kasus penimbunan pesisir Mariso, Pembangunan hotel di belakang Polair, penimbunan pesisir Buloa, dan terakhir reklamasi pantai oleh pihak GMTDC. (Acen, 2008) Pemkot Makassar juga membuat master plan rencana reklamasi kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar yang memasukkan rencana pembangunan *Centre Point of Indonesia* atau COI/CPI di dalam-nya yang dinamakan *Equilibrium Center Park* (ECP).

Selanjutnya di tahun 2011 setelah terbitnya izin AMDAL, COI berganti nama menjadi CPI (Center Point of Indonesia). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kota tepatnya pada bulan Maret dan April guna mengatur batas wilayah, master plan, serta tata cara perizinan pembangunan CPI, hasil rapat kordinasi tersebut dipaparkan pada keputusan Gubernur No. 2026/VI Tahun 2011. Dari 14 perusahaan yang dirilis oleh media sebagai calon pemegang tender, PT. Yasmin Bumi Asri akhirnya terpilih sebagai pihak pengembang dalam proyek CPI. Izin reklamasi oleh pihak pengembang berhasil disetujui dan direkomendasikan oleh Walikota Makassar dengan Surat Izin No.650/33/DTRB/VI/2012 pada tahun 2012.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan tentang izin lokasi reklamasi pada kawasan pusat bisnis terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan strategis provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013; dan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/TARKIM tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi, persiapan pekerjaan proyek CPI pun dimulai pada akhir tahun 2013 ditandai dengan aktifitas reklamasi pada pesisir

pantai Losari.

Salah satu proyek besar di Kota Makassar adalah kebijakan reklamasi CPI, yang bertujuan untuk membangun pulau buatan yang akan menjadi pusat perdagangan dan pariwisata. Sekitar 1.290 hektar perairan akan diubah menjadi daratan oleh proyek ini, yang akan mencakup garis pantai sepanjang 6,2 kilometer. Reklamasi dibuat oleh CPI Makassar sebagai pengganti 43 Kepala Keluarga (KK) yang telah lama tinggal di tanah yang kini dimiliki Ciputra. Bahkan, reklamasi CPI mengganggu akses nelayan ke laut atau membuat dangkal, dan larangan menangkap ikan di sekitar lokasi dimulai delapan tahun sebelumnya. Nelayan menolak proyek itu sejak awal karena menyebabkan banyak masalah.

Dalam analisis Ekologi Politik memandang lingkungan sebagai arena di mana kekuasaan dan politik diperebutkan, dan kebijakan lingkungan dapat mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam konteks kebijakan reklamasi CPI di Kota Makassar. Pada dasarnya, kebijakan reklamasi CPI di Kota Makassar memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan di daerah tersebut. Dampak negatif tersebut dapat berupa dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan, serta risiko bencana. Kerusakan lingkungan akibat kebijakan reklamasi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas udara dan air di wilayah tersebut, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas kehidupan masyarakat.

Kenaikan IPM di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir yaitu, tahun 2020 sebesar 82,25, tahun 2021 sebesar 82,66, dan tahun 2022 sebesar 83,12 (BPS, 2023).

Tabel 2 Data IPM Kota Makassar 2020-2022

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2020	2021	2022
Kota Makassar	82.25	82.66	83.12

Sumber: BPS Kota Makassar

Namun dengan angka yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan. Efek proyek CPI yang dirasakan masyarakat pesisir. CPI merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selama proyek ini dimulai sampai saat ini masyarakat tidak merasakan efek dari proyek ini. Masyarakat pesisir yang tidak terlibat dalam proyek atau tidak memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dan sumber daya manusia yang dibangun dapat merasa tidak merasakan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan.

Dampak dari kebijakan reklamasi CPI di Kota Makassar di antaranya:

1. Dampak Ekonomi Masyarakat Pesisir

Proyek reklamasi ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Perubahan sosial dan budaya tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi CPI di Kota Makassar juga dapat berdampak pada kesejahteraan di daerah tersebut. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat kebijakan ini dapat mengancam kesejahteraan sosial dan mental masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, risiko bencana yang meningkat akibat kebijakan reklamasi ini dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan berpotensi menurunkan IPM di wilayah tersebut.

Penambangan pasir laut oleh PT Boskalis buat proyek CPI sudah menyebabkan 250 nelayan jadi pekerja informal semacam tukang batu serta pemulung (WALHI SULSEL, 2019). Tidak hanya itu, pemasukan 6. 474 nelayan anjlok sampai 80%. Setelah itu, pengaruh yang lain merupakan beach wear. Nyaris seluruh desa mempunyai keausan 10 sampai 20 m. Dampaknya, 20 rumah rusak berat serta 2 tempat pemakaman universal pula rusak berat (Makassar AntaraneWS, 2018).

Gambar 1 Grafik Persentase Nelayan yang Terkena Dampak Tambang Pasir di Makassar



Sumber: WALHI, 2019

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purris Girsang menjelaskan bahwa proyek reklamasi yang melakukan tambang pasir, telah memberi dampak secara langsung terhadap perekonomian nelayan di Pesisir Makassar. Lokasi penambangan pertama telah merusak lima titik wilayah tangkap yaitu Taka lantang, Taka Talua, Taka Bau, Taka taka, dan Panangbu'ngia (WALHI, 2019). Dimana titik tangkap ikan yang menjadi tempat untuk aktivitas ekonomi dari nelayan, telah terjadi tumpang tindih dengan lokasi tambang pasir di pesisir Makassar. Saat ini, kelima lokasi tersebut tidak lagi memberikan hasil tangkapan seperti sebelumnya. Sebelumnya, nelayan paling sering datang ke lokasi

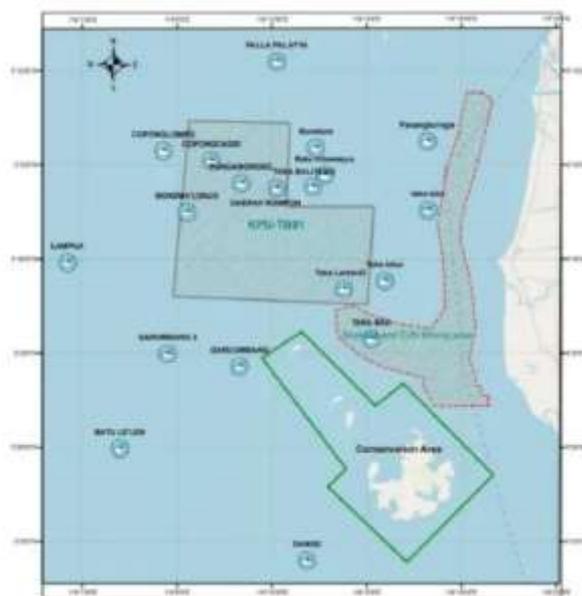
tersebut karena lokasinya yang dekat dari pesisir dan memiliki banyak hasil tangkapan. Lokasi penambangan juga dekat dengan Pulau Tanakeke, yang merupakan wilayah konservasi (Girsang, 2019).

Reklamasi CPI tentu merupakan momok bagi masyarakat yang terkena dampak langsung baik secara materil maupun secara ekonomis. Pemukiman, mata pencaharian, hingga akses menjadi terganggu sejak proyek tersebut digalakkan. Di sisi lain, tidak ada inisiatif pun itikad baik dari pengembang terhadap kondisi masyarakat yang dirugikan dari mega proyek tersebut. Tanggapan masyarakat jelas, mereka menolak reklamasi yang mengorbankan hajat hidup mereka. Namun penolakan tersebut seperti gema yang memantul kembali ke asalnya, pihak berwenang tetap kukuh dengan dalil-dalil dan ekspektasi lain dengan mengindahkan suara masyarakatnya.

Penelitian yang dilakukan Anwar Aziz juga memperlihatkan kondisi kesejahteraan nelayan sangat rendah dan sebanding dengan kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin Indonesia (63,47 persen) tinggal di daerah pesisir dan pedesaan. Seorang buruh tani (termasuk buruh nelayan) menerima upah sebenarnya (real) per hari sebesar Rp. 30.449. Ini jauh lebih rendah daripada upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan mandor) sebesar Rp. 48.301. Karena ada hubungan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir, hal ini harus diperhatikan (Aziz, 2022).

Ini juga menambah kesengsaraan nelayan pesisir yang kurang dari rata-rata. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan, misalnya dari hanya membutuhkan tiga liter, membengkak menjadi lima sampai tujuh liter sehari. Sehingga kondisi ini melahirkan jeratan kemiskinan masyarakat pesisir yang berpengaruh terhadap ekonomi yang terus memburuk.

Gambar 2 Peta Hasil Overlay Titik-Titik Tangkap Nelayan Dengan Lokasi Tambang



Sumber: WALHI, 2019

2. Kerusakan Lingkungan

Pembangunan pulau buatan ini akan mengubah perairan menjadi daratan dan mengubah ekosistem alami laut yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat alam untuk flora dan fauna yang ada di laut.

Dampak reklamasi pantai dapat mengakibatkan hilangnya sumber tanah material urukan, membutuhkan banyak tanah, frekuensi transportasi tinggi, akan merusak ruas jalan, perubahan topologi dan ketinggian, terganggu dan berubahnya kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Fenomena pencemaran tersebut di atas banyak terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air Pantai Losari yang tidak dapat digunakan untuk peruntukan. Hasil beberapa penelitian terhadap kualitas air Pantai Losari menunjukkan bahwa kondisi perairan tersebut semakin memburuk. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yaitu rendahnya keanekaragaman spesies biota dan meningkatnya kandungan polutan seperti logam berat dan bahan organik, melebihi perkembangan maksimal organisme tropis (Supriharyono, 2002). Oleh karena itu, agar lebih jelas melihat perubahan baku mutu air sebelum dan sesudah reklamasi Pantai Losari (Jaya et al., n.d.).

Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa semua parameter kimia di Pantai Losari berubah ke arah negatif. Sebelum alat reklamasi Pantai Losari (yang tidak dilaporkan) digunakan, parameter kimia air di Pantai Losari adalah nol atau rata-rata. Pengangkutan sedimen dan unsur hara dari Kanal Jongaya oleh massa air tawar meningkatkan konsentrasi bahan organik (BOD) di dalam air. Akibatnya, kadar oksigen di dalam air rendah (Jaya et al., n.d.). Hal diwakili oleh nilai fosfat terlarut (80 ppm) dalam air yang berasal dari acara hotel domestik dan kantin/restoran. Nitrat (NO₃-N) diukur pada rentang konsentrasi 0,13 ppm, diluar kategori spesifikasi (Andal IPAL Losari, 2011) (Jaya et al., n.d.).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fuadi, dapat disimpulkan bahwa empat indikator menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Indonesian Center Point (CPI) terhadap kemungkinan pencemaran sampah di sekitar Pantai Losari. Termasuk dalam kategori *low level of proximity*, indikator trading memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 64%. Selain itu,

indeks jabatan sebesar 1,8% dianggap sangat rendah dalam hal keintiman. Kegiatan ibadah mewakili 48,5% kemesraan sangat kuat, dan area ruang publik mewakili 48,8%. Secara keseluruhan, untuk menjadikan CPI sebagai area yang potensial dan strategis untuk Kota Makassar, manajemen acara dari kegiatan ibadah dan ruang publik harus dipertimbangkan. Ini sejalan dengan dampak yang sangat besar dari kedua kegiatan tersebut. (Fuadi et al., n.d.).

Selain itu proyek-proyek CPI yang saat itu membuat nelayan menangis, masih menjadi sorotan. *Aliansi Save the Coastal* (ASP) mendesak Ciputra untuk tidak lagi membangun jembatan yang dapat mengganggu akses nelayan dari tiga kecamatan yakni Tamarunang, Panamungan dan Bonttoranu, kawasan Mariso Makassar. Sangat sulit menangkap ikan, udang dan kerang dengan proyek CPI. Karena tercemar dan mendung di sekitar CPI, biota laut tidak bisa bertahan lama dan kemudian mati. Karena daerah penangkapan ikan tercemar dan nelayan harus melaut lebih jauh dari biasanya untuk hidup.

Berdasarkan data BPBD Prov. Sulawesi Selatan, CPI merupakan kawasan yang berada dalam bahaya abrasi dengan tingkatan yang rendah sampai tingkat tinggi. Pada kondisi ini perlu diatensi sehingga kedepannya dapat menghasilkan solusi ataupun strategi yang kedepannya menjadi acuan bagi pemerintah dan pengembang untuk mengembangkan Kawasan CPI menjadi Kawasan Strategis Bisnis Global Terpadu kota Makassar. Dapat dilihat dari table berikut.

Gambar 3 Indeks Bahaya Abrasi pada Kawasan *Center Point of Indonesia*

Indeks Bahaya Abrasi pada Kawasan Center Point of Indonesia

No	Indeks Bahaya	Luas (Ha)
1	Rendah	4,21
2	Sedang	1,61
3	Tinggi	15,13
Luas Bahaya Abrasi		20,94
Luas Wilayah Kawasan CPI		119,05
Persentase Bahaya Abrasi		17,58%

Sumber: Data hasil olahan Tesis Thamrin, 2022

Berdasarkan penelitian Akhiruddin Marrung Jaya yang dilakukan, Reklamasi Pantai Losari juga mengakibatkan kualitas air tergolong tercemar, sedangkan kadar logam berat yang terdeteksi sebelum reklamasi Pantai Losari masih tergolong tidak tercemar. Tetapi setelah memulihkan beberapa logam berat seperti merkuri (<0,01 ppm), arsenik (<0,02 ppm), kadmium (<0,002-0,07 ppm), tembaga (<0,015 ppm) dan timbal (0,19 dan 1,73 ppm). Sebagai contoh tingginya logam Cd (0,07 ppm) di kawasan Pantai Losari diduga karena adanya akumulasi logam dalam jumlah yang besar pada sedimen disekitarnya dimana Pantai Losari merupakan teluk yang semi tertutup, sehingga kemungkinan terjadi polutan dalam jumlah besar terakumulasi di sumber yang masuk ke Losari Di sedimen limbah di perairan pantai. Cossa (1988) dan Phillips (1991) menunjukkan bahwa

pencemaran sedimen pantai perkotaan terutama berasal dari limbah padat, limbah cair, limbah rumah tangga dan limbah perkotaan (Jaya et al., n.d.).

Berdasarkan hasil tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa besaran wilayah yang termasuk dalam kawasan bahaya abrasi adalah 20,94 Ha atau sekitar 17,58 % dari luasan Kawasan CPI.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis, kebijakan reklamasi proyek CPI yang merugikan masyarakat pesisir dampak yang ditimbulkan pada sosial-ekonomi masyarakat pesisir, menambah kesengsaraan nelayan pesisir yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari ikan dengan jarak yang lebih jauh. Reklamasi ini juga sangat berdampak pada kondisi lingkungan laut. Fenomena pencemaran yang terjadi di sekitaran pantai Losari Kota Makassar mengakibatkan kondisi perairan tersebut semakin memburuk. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yaitu rendahnya keanekaragaman spesies biota dan meningkatnya kandungan polutan seperti logam berat dan bahan organik, melebihi perkembangan maksimal organisme tropis, abrasi, penurunan kualitas air pada wilayah pesisir dan perairan di sekitar Kawasan CPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Anwar. 2022. *Strategi Nafkah Nelayan Pasca Reklamasi CPI di Kelurahan Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Bimontoro, A. 2022. *Analisis Interaksi Ekonomi Nelayan dan Pembangunan Center Point of Indonesia di Makassar... Analisis Interaksi Ekonomi Nelayan dan Pembangunan Center Point of Indonesia di Makassar*. <https://rm.id/kategori-berita/etalase-bisnis>
- Bookchin, M. 1982. *The Ecology of Freedom the Emergence and Dissolution of Hierarchy*.
- BPS Kota Makassar. 2023. *HASIL LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020 KOTA MAKASSAR BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR*. <https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NzNiYmRkZDIyNWQ2ZWQzODAwZGFmTE0&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmVudGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzIwMjMvMDIvMDkvNzNiYmRkZDIyNWQ2ZWQzODAwZGFmTE0L2hhc2lsLWxvbmctZm9ybS1zZW5zdXMtcGVuZHVkdWstMjAyMC1rb3RhLW1ha2Fzc2FyLmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNC0wOCAxOT00OT00OQ%3D%3D>
- Fuadi, N., Mone, N., Surur, F., Islam, U., & Alauddin Makassar, N. (n.d.). *DAMPAK PENGEMBANGAN CENTER POINT OF INDONESIA (CPI) TERHADAP POTENSI PENCEMARAN LIMBAH DI SEKITAR PANTAI LOSARI (Studi Kasus: Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar)*.
- Fatimah, Siti. "Metode Studi Literatur dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 15-26.\
- Giddens, Anthony. 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley: University of California Press.
- Girsang, purris. 2019. *Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai (Studi kasus: Pantai Losari, Makassar)*. Institut Teknologi Kalimantan. https://www.academia.edu/40633325/Dampak_Sosial_Ekonomi_Pengembangan_Reklamasi_Pantai_Studi_kasus_Pantai_Losari_Makassar
- Irianto, Sulistyowati & Santoso, Agus. 2013. *Ekologi Politik: Pengantar Studi tentang Lingkungan Hidup*. Penerbit Refika Aditama.
- Jaya, A. M., Tuwo, A., Sosiologi, K., Lingkungan, P., Hidup, L., Hasanuddin, U., Kelautan, K. I.,

- Kelautan, I., Perikanan, D., & Fakultas, S. P. (n.d.). KAJIAN KONDISI LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI REKLAMASI PANTAI LOSARI DAN TANJUNG BUNGA THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND SOCIAL EKONOMI CHANGE RECLAMATION LOSARI BEACH AND TANJUNG BUNGA.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 2.
- Muhammad Alfian, R., Lukman, K., Handoyo, T., Mulki Ernas, B., Perencanaan Pembangunan Daerah, B., & Barru, K. (2021). Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari. *In Development Policy and Management Review (DPMR)* (Vol. 1, Issue 2). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/68>
- Peet, R., & Watts, M. (Eds.). 2004. *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.
- Putra, B. 2021. *Ekologi Sosial: Sebuah Pengantar: Bima Satria Putra: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive. Arsip Bawah Tanah*. <https://archive.org/details/ekologi-sosial/page/18/mode/2up>
- Putra, R. 2019. *BAB V MEMBACA MURRAY BOOKCHIN DALAM RELEVANSINYA DI INDONESIA*. https://www.academia.edu/62924539/Bab_V_Membaca_Murray_Bookchin_dalam_Relevansinya_di_Indonesia?auto=download&email_work_card=download-paper
- Rahman, Nurhayati. 2009. *Kearifan Lingkungan Hidup Manusia Bugis*. Makassar: La Galigo Press.
- Robbins, P. 2012. *Political ecology: a critical introduction*. John Wiley & Sons.
- Supriadi, Dedi. 2017. *Ekologi Politik: Wacana dan Aksi Perjuangan Lingkungan Hidup*. Penerbit Nuansa.